

# BAB I

## PENDAHULUAN

**1.1 Latar Belakang Masalah Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada karakter warga negara dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama melalui pendidikan berbasis karakter.**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab V Pasal 26 menyebutkan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut maka seseorang harus mengikuti pendidikan dasar sebagai bekal untuk meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Sistem pendidikan Nasional memiliki visi yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang Pancasilais yang dimotori oleh pengembangan afeksi seperti sikap suka belajar, tahu cara belajar, rasa percaya diri, mencintai prestasi tinggi, punya etos kerja, kreatif dan produktif, serta puas akan sukses yang dicapai.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka di dalam Bab II Pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, sekolah berfungsi dan bertujuan sebagai berikut:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sesuai fungsi dan tujuan di atas, guru, orang tua dan masyarakat mempunyai peranan dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan tersebut. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dengan adanya peran peningkatan kualitas pendidikan, karena pendidikan merupakan sarana strategis bagi peningkatan baik intelektual, sikap maupun skill. Sehingga diharapkan melalui pendidikan sumber daya manusia (SDM) memiliki daya saing tinggi.

Sebagai salah satu komponen pembelajaran, model mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satu pun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pembelajaran. Ini berarti, guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar keberadaan siswa juga sangat strategis diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya, karena keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh faktor intern maupun eksteren. Seperti minat, bakat, kecerdasan termasuk dalam hal menerima dan memahami pelajaran, lingkungan, metode belajar, fasilitas, dan sebagainya.

Seperti diketahui bahwasanya dalam pendidikan dasar di sekolah dalam hal belajar tidak perlu harus monoton dan menggunakan metode ceramah yang terus menerus sampai pembelajaran berakhir, karena bagi mereka sangat membosankan khususnya pelajaran PPKn yang sekarang diperlukan keberadaannya itu. karena sangat diperlukan dalam membina sikap dan karakter siswa dalam kehidupan sehari-hari. Perlu beberapa metode dalam melaksanakan pembelajaran di kelas agar para siswa mempunyai minat belajar yang tinggi khususnya dalam pelajaran PPKn di kelas maupun di luar kelas. Seperti diketahui metode pembelajaran konvensional merupakan metode yang kurang tepat digunakan pada saat ini dalam proses pembelajaran. Karena pemerintah pada tahun ini sangat gencar-gencarnya dalam melakukan

sosialisasi kepada guru-guru di Indonesia dalam pembelajaran di kelas harus menekankan pada pendekatan saintifik.

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti beberapa waktu lalu di SMP Negeri 1 Torgamba di kelas VIII-1 membuat peneliti ingin melakukan penelitian di sekolah tersebut. Pada saat peneliti menanyakan kegiatan belajar mengajar di kelas tersebut penulis mendapati masih menggunakan pembelajaran konvensional di kelas dan tidak ada salah satu guru pun yang menggunakan model, atau strategi dalam pembelajaran baik itu mata pelajaran PPKn maupun mata pelajaran lainnya. Akibatnya siswa dalam mengikuti pembelajaran itu tidak serius dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas.

Setelah peneliti melihat proses pembelajaran di kelas, kemudian meminta nilai ujian semester siswa di kelas tersebut khususnya mata pelajaran PPKn kepada wali kelas dan hasilnya cukup mencengangkan. Sejak tahun 2013 dan 2014 Dari seluruh siswa yang ada di kelas VIII-1 Yaitu 40 siswa kurang dari 50% siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM di sekolah tersebut. Nilai hasil rendah tersebut terjadi dikarenakan siswa dalam pembelajaran tidak aktif dan keadaan ini justru menjadi persoalan yang harus dituntaskan. Sedangkan untuk nilai KKM yang di terapkan di sekolah tersebut adalah 70. Apabila peneliti melihat siswa yang berada di kelas maupun sekolah tersebut memiliki kemampuan yang di bawah standar kriteria ketuntasan minimal.

Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Hasil Rata-rata Nilai PKN siswa Kelas VIII-1**

NO	Tahun Pelajaran	Nilai Rata- rata	
		Semester 1	Semester II
1	2012/2013	55	56
2	2013/2014	60	58

Berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil belajar PPKn siswa di kelas tersebut merupakan nilai murni dari ujian semester siswa. Berdasarkan hasil tersebut menurut wawancara dengan salah seorang siswa mengungkapkan bahwasanya siswa sangat sulit memahami mata pelajaran PPKn dikarenakan tidak digunakannya inovasi pembelajaran di kelas dan berbagai model pembelajaran yang ada.

Di samping dari hasil belajar yang sudah dibahas di atas dan berdasarkan dari observasi di sekolah, kondisi moral karakter para pelajar juga merosot. Ini terlihat pada saat guru menerangkan siswa ada yang tidak disiplin di dalam kelas. Selain itu siswa masih kurang sadar diri akan kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Sebagaimana diketahui mereka adalah penerus tongkat estafet bangsa ini ke depan. Seiring dengan itu fenomena tidak terlaksananya pendidikan karakter di sekolah berdampak juga pada perilaku-perilaku negatif yang muncul akhir-akhir ini. Saat ini dalam dunia pendidikan sudah mengalami penurunan dalam hal karakter. Oleh karena itu diantisipasi dengan adanya program pemerintah dalam pembelajaran di sekolah dalam hal karakter bangsa. Pendidikan karakter adalah upaya dalam rangka membangun karakter (*character building*) peserta didik untuk menjadi lebih baik. Sebab, karakter dan kepribadian peserta didik sangat mudah untuk dibentuk. Secara etimologis karakter dapat dimaknai sesuatu yang bersifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, spiritual, ataupun perangai.

Kalau melihat kondisi moral para pelajar bangsa kita saat ini sangat miris sekali. Krisis moral dan kurangnya pemahaman Norma yang ada di kalangan pelajar bangsa sudah merajalela. Hal ini bisa kita lihat di berbagai media cetak maupun media elektronik yang menampilkan moral dan karakter pelajar bangsa yang sangat bobrok. Bukan hanya pemuda-pemudi, bahkan masyarakat secara luas sudah memperlihatkan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya. Di stasiun Televisi, ditayangkan tindakan tawuran oleh peserta didik kita, terlibat aksi asusila yang baru-baru ini banyak ditayangkan di stasiun TV, tindakan kriminal, dan

masih banyak lagi aksi brutal lainnya. Sementara itu menurut Tina Sitompul dalam jurnal Jurnal Tematik pendidikan Dasar (2013:2) menunjukkan bahwa merosotnya karakter bangsa mengakibatkan perilaku yang tidak berkarakter seperti korupsi di ranah legislative, eksekutif, dan yudikatif. Hasil penelitian beliau tersebut menunjukkan bahwasanya melalui pelajaran PPKn dapat menumbuhkan karakter siswa. Sementara itu Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Muhammad Nuh (Balitbangsu, 2011:99) menegaskan bahwa pendidikan budaya karakter bangsa perlu dimasukkan dalam kebijakan pembangunan pendidikan nasional, karena tatakrama, etika dan kreatifitas lulusan dianggap menurun dan menjadi keluhan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan PPKn yang mengedepankan nilai-nilai pendidikan karakter, mata pelajaran PPKn di SMP harus dirancang dengan pendidikan berbasis karakter. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang berorientasi pada *student centered learning* serta didukung oleh materi pelajaran yang mengadopsi nilai-nilai karakter. Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah, oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selanjutnya disebut dengan PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Salah satu tujuan PPKn yaitu membentuk watak atau karakteristik warga Negara yang baik (Soemantri dalam Ruminiati 2008: 1-25). Sedangkan tujuan PPKn di Pendidikan Dasar yaitu

membentuk warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya (Ruminiati 2008: 1-26).

Berdasarkan keputusan pendapat di atas, kelak siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang terampil, cerdas, bersikap baik, dan mampu mengikuti kemajuan teknologi modern. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Nomor 20 Pasal 3 yaitu untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara jujur memang harus diakui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan di sekolah- sekolah Khususnya di pendidikan dasar belum berlangsung seperti yang diharapkan. Guru cenderung menggunakan teknik pembelajaran yang bercorak teoritis, hafalan, serta ceramah sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung kaku, monoton, membosankan dan siswa kurang memahami apa yang telah disampaikan oleh guru. sehingga Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum melekat pada diri siswa sebagai sesuatu yang rasional, kognitif, emosional dan afektif.

Saat ini metode pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sudah ada dan banyak dilakukan di SMP/Mts selain pembelajaran dengan ceramah adalah diskusi. Penggunaan metode diskusi kelompok pun belum mampu melibatkan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran secara aktif, kreatif, afektif, dan menyenangkan. Hanya siswa tertentu yang terlibat dalam proses diskusi secara dialogis dan interaktif. Akibatnya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum mampu menjadi mata pelajaran yang disenangi dan dirindukan siswa.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa sangatlah perlu dikembangkan dan dibina kemampuan profesional untuk mengelola program dan proses belajar di kelas sesuai

dengan materi yang diajarkan. Kemudian guru dituntut juga harus mengetahui dan bisa mengelola pembelajaran, diantaranya dalam hal menggunakan media atau model-model pembelajaran yang tepat di kelas. Penggunaan model yang salah, akan membuat siswa merasa bosan dan hasil belajarnya yang rendah.

Melihat kondisi di atas peneliti melakukan upaya pembentukan karakter siswa yang berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar PPKn yang lebih baik. Salah satu model pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL). Dengan model *Problem Based Learning* ini siswa diharapkan dapat saling belajar, bekerjasama, dan saling berkomunikasi secara lisan sehingga mampu memecahkan suatu masalah dan lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar. Menurut Khairat dalam Jurnal Tematik pendidikan Dasar Unimed (2013:39) menunjukkan bahwa implementasi PBL dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa di kelas IV SD Negeri 067774.

Melihat kenyataan bahwa keterlibatan siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Torgamba kelas VIII-1 masih jauh dari keberhasilan pembelajaran yang ada, karena: (1) Siswa kurang berminat dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas pada mata pelajaran PPKn, (2) Siswa kurang berani bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dikuasai, (3) Penjelasan guru monoton dan sulit dipahami oleh siswa, (4) Pengalaman belajar siswa yang terkait materi masih sangat kurang karena kurangnya minat dalam belajar PPKn, (5) Siswa kurang merespon secara aktif dan kurang motivasi, (6) Tidak menggunakan beberapa model, strategi dalam pembelajaran di kelas.

Dari uraian diatas dan realita yang terjadi di SMP Negeri 1 Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Implementasi Model *Problem Based Learning* Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PPKN



Dan Menumbuhkan Nilai Karakter Siswa di Kelas VIII SMP Negeri 1 Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun Ajaran 2014/2015.

Model ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan menumbuhkan nilai karakter siswa di kelas baik itu bekerja sama dengan temannya maupun bertanggung jawab secara mandiri di kelas. Karena seperti peneliti ketahui bahwa penelitian tindakan kelas memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan hasil belajar bila diimplementasikan dengan baik.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman guru tentang strategi/metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa
2. Kurangnya penanaman nilai-nilai karakter melalui mata pelajaran PPKn yang harus dibelajarkan kepada siswa
3. Belum berkembangnya karakter siswa setelah proses pembelajaran
4. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran di kelas
5. Hasil belajar PPKn siswa rendah

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Melihat luasnya cakupan masalah yang teridentifikasi dibandingkan dengan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, maka perlu memberi batasan terhadap masalah yang akan dikaji agar lebih terarah. Oleh karena itu penelitian ini terbatas pada:

1. Implementasi model pembelajaran *Problame Based Learning* (PBL) Untuk meningkatkan Hasil Belajar PPKn di Kelas VIII-1 SMP NEGERI 1 Torgamba
2. Menumbuhkan Nilai karakter siswa yang ada di kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Torgamba



#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Melalui Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar PPKN Siswa Kelas VIII-1 di SMP N 1 Torgamba?
2. Apakah melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning dapat menumbuhkan nilai karakter siswa di kelas VIII-1 di SMP N 1 Torgamba?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar PPKN Siswa Kelas VIII-1 di SMP N 1 Torgamba.
2. Untuk Mengetahui melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning dapat menumbuhkan nilai karakter siswa di kelas VIII-1 di SMP N 1 Torgamba.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman yang Luar biasa bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian di SMP Negeri1 Torgamba
2. Bagi Guru dan sekolah Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk lebih lanjut terkait dalam inovasi proses pembelajaran di kelas
3. Bagi penulis dan Mahasiswa Memberikan informasi bagi guru PPKn di sekolah maupun mahasiswa konsentrasi PPKn dalam meningkatkan Hasil belajar dan penerapan nilai-nilai karakter yang harus dibelajarkan pada siswa